



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR **93** TAHUN 2019

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU  
TENGGARA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indoneisa Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 8 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019-2023.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan;
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa;
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas;
9. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

### Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana disusun dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

## BAB III PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Program Reformasi Birokrasi meliputi :
  - a. manajemen perubahan;
  - b. penguatan pengawasan;
  - c. penguatan akuntabilitas kinerja;
  - d. penguatan kelembagaan;
  - e. penguatan ketatalaksanaan;
  - f. penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
  - g. penguatan peraturan perundang-undangan;
  - h. peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - i. monitoring evaluasi dan pelaporan.

## BAB IV TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

### Bagian Kesatu Program Manajemen Perubahan

#### Pasal 5

Tujuan manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu dan atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

### Bagian Kedua Program Penguatan Pengawasan

#### Pasal 6

Tujuan Penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, merubah perilaku yang koruptif atau perilaku negatif untuk menjadi perilaku yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

### Bagian Ketiga Penguatan Akuntabilitas Kinerja

#### Pasal 7

Tujuan penguatan akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakan.

### Bagian Keempat Program Penguatan Kelembagaan

#### Pasal 8

Tujuan penguatan kelembagaan adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kelembagaan secara proporsional sesuai dengan pelaksanaan tugas, sehingga kelembagaan menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran dan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif.

Bagian Kelima  
Penguatan Ketatalaksanaan

Pasal 9

Tujuan penguatan ketatalaksanaan adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem proses bisnis dan prosedur yang jelas, efektif dan terukur dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bagian Keenam

Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 10

Tujuan Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dilakukan mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh kesejahteraan sepadan.

Bagian Ketujuh

Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 11

Tujuan penataan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasal 12

Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan mendorong pelayanan lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.

Bagian Kesembilan  
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Tujuan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Pasal 14

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
- (3) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap 1 (satu) tahun sekali Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Pengarah, kemudian dibahas dalam rapat bersama Tim Pengarah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pengarah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019 -2023 ini, digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara periode 2019-2023;

(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019 -2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
Pada tanggal **31** Desember 2019

**BUPATI MALUKU TENGGARA,**

Cap/ttd

**MUHAMAD THAHER HANUBUN**

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal **31** Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR **93**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 93 TAHUN 2019  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mewujudkan Visi RPJMD : “Terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis dan berkeadilan”, telah menentukan 5 (lima) Misi untuk mencapainya. Salah satunya adalah Mengoptimalkan kinerja dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten, harmonisasi dan pelurusan (*streamlining*) berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem Sumber Daya Manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan

besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berisi uraian tentang kondisi umum Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka pemenuhan harapan-harapan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

#### A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada periode 2014-2018 ditujukan untuk mencapai tiga sasaran, yakni : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mencapai tiga sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator dari masing-masing sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Secara umum pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada periode 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Capaian Tahun:				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8
Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
	Tingkat Maturitas SPIP	-	-	-	Level 3	Level 3
	Persentase penyampaian LHKPN	31,17	47,76	38,46	58,45	82,5
	Tingkat Kapabilitas APIP	-	-	Level 2	Level 3	Level 3
	Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten Maluku Tenggara	50,83 (CC)	50,87 (CC)	52 (CC)	55,83 (CC)	57,82 (CC)
Birokrasi yang efektif dan efisien	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui system <i>e-procurement</i>	-	100%	100%	100%	100%
	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maluku Tenggara	40,57	49,8	-	-	-
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	104 %	100 %	100 %	108 %
	Nilai kepatuhan terhadap Undang-Undang pelayanan publik	-	-	36,94 (Zona Merah)	53,44 (Zona Kuning)	69,78 (Zona Kuning)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,96	74,08	75,73	73,97	73,84

## **B. Kebutuhan/ Harapan Pemangku Kepentingan**

Harapan pemangku kepentingan terhadap sasaran perubahan reformasi birokrasi untuk mewujudkan "Birokrasi yang bersih dan Akuntabel" yaitu :

1. Mempertahankan opini BPK.  
Kabupaten Maluku Tenggara perlu meningkatkan ketertiban akuntabilitas keuangannya sehingga dapat terus mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan.
2. Peningkatan maturitas SPIP.  
Ini mencerminkan harapan masyarakat agar setiap Peringkat Daerah dapat meningkatkan Level maturitas sehingga dapat bertindak adil dan berintegritas, dimulai dari pengawasan internal sendiri.
3. Penegasan penyampaian LHKPN bagi wajib LHKPN secara transparan dan akuntabel dalam pengisian LHKPN.  
Harapan ini berkaitan dengan sebuah indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan aparatur yang jujur, penuh pengabdian.
4. Peningkatan kapabilitas APIP  
Diharapkan agar seluruh aparat pengawas intern pemerintah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dengan lebih baik.
5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.  
Harapan agar kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara berorientasi pada hasil sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang lebih nyata pada masyarakat.
6. Transparansi proses pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*.  
Harapan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat akan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga masyarakat menginginkan kejujuran dan keadilan.

Harapan pemangku kepentingan terhadap sasaran perubahan reformasi birokrasi untuk mewujudkan "Birokrasi yang efektif dan efisien" yaitu:

1. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi  
Birokrasi yang lebih efektif dan efisien perlu dikembangkan lagi supaya perubahan birokrasi lebih signifikan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
2. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.  
Harapan ini mendukung supaya tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif.

Harapan pemangku kepentingan terhadap sasaran perubahan reformasi birokrasi untuk mewujudkan "Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas" yaitu:

1. Peningkatan nilai kepatuhan terhadap UU pelayanan publik  
Harapan meningkatnya nilai kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik adalah untuk kualitas pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah pemberi layanan.
2. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat.  
Tuntututan peningkatan daya tanggap pelayanan publik yang memuaskan.
3. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.  
Diharapkan agar Perangkat Daerah dapat melayani semua jenis pelayanan publik serta pelayanan perizinan dan non perizinan guna mewujudkan layanan yang cepat, efektif dan efisien.

### **C. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Banyak kemajuan dan hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014-2018. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan yang perlu dan akan terus dicarikan upaya untuk mengatasi. Kelemahan/permasalahan tersebut antara lain:

## 1. Organisasi

Beberapa permasalahan di bidang organisasi yang saat ini masih ada, antara lain:

- a. Pasca perubahan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa SKPD yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada SKPD yang tugas fungsinya tumpang tindih;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:
  - 1) Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
  - 2) Mengukur jenjang organisasi;
  - 3) Kemungkinan duplikasi fungsi;
  - 4) Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.

## 2. Ketatalaksanaan

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain:

- a. *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah;
- c. Belum optimalnya pengembangan *e-government*, antara lain:
  - 1) Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja;
  - 2) Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan;
  - 3) Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara online);

- d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

### **3. Perundang-undangan**

Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati;
- b. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati;

### **4. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:

- a. Penyusunan formasi belum didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja;
- b. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun;
- c. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur;
- d. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan;
- e. Pemberian *reward dan punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
- f. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai;
- g. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan;
- h. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal.

## 5. Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Belum terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal;
- f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

## 6. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain :

- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan SKPD dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada SKPD;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja SKPD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
- f. Belum tersusunnya *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas

"*siapa melakukan apa*" terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;

- g. Rendahnya kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **7. Pelayanan Publik**

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online dengan menggunakan system Online Single Submission/ OSS;
- b. Pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Perangkat Daerah belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
- d. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik;
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui LAPOR-SP4N belum dilaksanakan secara baik;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

## **8. Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*) Aparatur**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten terkait mental aparatur atau pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) antara lain:

- a. Belum dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
- c. Masih tingginya ego sektoral pada setiap OPD yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja daerah; dan

- d. Rendahnya tingkat pemahaman aparatur terhadap uraian jabatan, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.

## BAB III

### AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

#### A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan identifikasi kondisi umum sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara difokuskan pada 4 (empat) fokus perubahan sebagai berikut :

##### a. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas pembinaan manajemen pemerintahan daerah merupakan prioritas yang dipilih dari delapan area perubahan reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi umum maka yang menjadi prioritas pembinaan manajemen pemerintah daerah difokuskan pada:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Organisasi;
3. Pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur;
4. Pelayanan Publik.

##### b. Prioritas yang harus terus dipelihara

Prioritas ini merupakan prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran. Prioritas yang harus terus dipelihara meliputi:

1. Opini BPK atas laporan keuangan;
2. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui system *e-procurement*;
3. Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat.

##### c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas

**pelayanan** Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

**Pertama**, Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

- 1) Kepegawaian

Untuk mewujudkan aparatur yang professional maka jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan adalah **kompetensi sumber daya aparatur**.

## 2) Kesehatan

Jenis Pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan adalah **penyediaan tenaga kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas**. Kabupaten Maluku Tenggara saat ini masih dihadapkan dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas dan terjangkau. Untuk itu, dengan penyediaan tenaga kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjawab segala keterbatasan yang ada.

### **Kedua, Quick Wins.**

Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan kesehatan;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemberi layanan perizinan dan non perizinan.

### **d. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

## B. Sasaran

Sasaran dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja serta target-target dapat dirumuskan sebagai berikut:

### a. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

#### 1) Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya informasi jabatan dan beban kerja Perangkat Daerah	Jumlah informasi jabatan dan beban kerja Perangkat Daerah	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Dokumen	1	1	1	1	1	Perangkat Daerah
Tersedianya informasi kebutuhan pegawai Pemerintah Daerah	Jumlah informasi kebutuhan pegawai masing-masing Perangkat Daerah		Pelaksanaan penghitungan kebutuhan pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
Tersedianya rencana pendistribusian pegawai	Jumlah rencana pendistribusian pegawai		Penyusunan rencana redistribusi pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
Tersedianya proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	Jumlah proyeksi kebutuhan pegawai		Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
Tersedianya formasi jabatan yang menunjang kinerja utama	Jumlah formasi jabatan yang menunjang kinerja utama		Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
Tersampainya informasi penerimaan pegawai kepada masyarakat	Jumlah media publikasi	Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Obyektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Publikasi penerimaan pegawai secara terbuka	Media publikasi	1	1	1	1	1	BKPSDM
Tersedianya informasi status pendaftar	Jumlah website pendaftaran pegawai		Pelaksanaan pendaftaran pegawai secara online	Website	1	1	1	1	1	BKPSDM
Terlaksananya seleksi pegawai berbasis Computer Assisted Tes (CAT)	Jumlah pelaksanaan seleksi pegawai menggunakan Computer Assisted Tes/ CAT.		Pelaksanaan seleksi pegawai secara transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersampainya informasi hasil seleksi penerimaan pegawai	Jumlah media publikasi hasil seleksi penerimaan pegawai		Publikasi hasil seleksi pegawai secara terbuka	Media publikasi	1	1	1	1	1	BKPSDM
Tersedianya standar kompetensi jabatan	Jumlah standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Penyusunan standar kompetensi jabatan	Dokumen	1	-	1	-	1	Bagian Organisasi
Terlaksananya assessment pegawai	Jumlah pelaksanaan assessment pegawai		Pelaksanaan assessment pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
Tersedianya informasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Jumlah informasi kebutuhan pengembangan kompetensi		Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Dokumen	-	1	-	1	1	BKPSDM
Tersedianya rencana pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah rencana pengembangan kompetensi pegawai.		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai	Dokumen	-	1	-	1	-	BKPSDM
Terlaksananya pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Persentase pengembangan pegawai sesuai rencana dan kebutuhan		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai rencana dan kebutuhan	%	100	100	100	100	100	BKPSDM
Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Promosi Jabatan Secara Terbuka	Jumlah Peraturan Bupati tentang Promosi Jabatan Secara Terbuka	Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka	Penyusunan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Peraturan Bupati	1	1	1	1	1	BKPSDM
Terlaksananya promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	Persentase jabatan pimpinan tinggi yang terisi sesuai promosi terbuka		Pelaksanaan promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	%	100	100	100	100	100	BKPSDM
Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Pelaksanaan Promosi Terbuka	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Pelaksanaan Promosi Terbuka		Pembentukan panitia seleksi pelaksanaan promosi terbuka	Surat Keputusan Bupati	1	1	1	1	1	BKPSDM
Tersampainya hasil tahapan seleksi	Jumlah media publikasi		Publikasi hasil tahapan seleksi secara terbuka	Media publikasi	1	1	1	1	1	BKPSDM
Tersedianya penetapan Indikator Kinerja Individu pada setiap Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menetapkan Indikator	Penetapan Kinerja Individu	Penerapan penetapan Indikator Kinerja Individu	%	-	100	100	100	100	Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kinerja Individu									
Tersedianya ukuran/ nilai kinerja individu secara tahunan	Presentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu secara tahunan		Pelaksanaan pengukuran, penilaian kinerja individu secara tahunan	%	-	100	100	100	100	Perangkat Daerah
Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Dokumen	-	-	1	1	1	Perangkat Daerah
Terlaksananya pengembangan karir sesuai hasil penilaian kinerja individu	Persentase pelaksanaan pengembangan karir sesuai hasil penilaian kinerja individu		Pelaksanaan pengembangan karir sesuai hasil penilaian kinerja individu	%	-	100	100	100	100	BKPSDM
Tersedianya tunjangan kinerja sesuai capaian kinerja individu	Persentase penerapan tunjangan kinerja sesuai capaian kinerja individu pada seluruh Perangkat Daerah		Pemberian tunjangan kinerja sesuai capaian kinerja individu	%	-	100	100	100	100	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Disiplin/ Kode Etik/ Kode Prilaku Pegawai	Jumlah Peraturan Bupati tentang Disiplin/ Kode Etik/ Kode Prilaku Pegawai	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai	Penyusunan kebijakan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	Peraturan Bupati	-	-	1	-	-	Bagian Organisasi
Terlaksananya penerapan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai		Implementasi aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah
Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai.		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	Dokumen	-	1	1	1	1	BKPSDM
Tersedianya penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	Persentase pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai		Pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	%	-	100	100	100	100	BKPSDM

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya informasi faktor jabatan	Jumlah informasi faktor jabatan	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Penyusunan informasi faktor jabatan	Dokumen	-	5	-	-	5	Bagian Organisasi
Tersedianya peta jabatan	Jumlah peta jabatan		Penetapan peta jabatan	Dokumen	-	5	-	-	5	Bagian Organisasi
Tersedianya kelas jabatan	Jumlah kelas jabatan		Penetapan kelas jabatan	Dokumen	-	5	-	-	5	Bagian Organisasi
Tersedianya sistem informasi kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Managemen Kepegawaian yang dibangun	Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan sistem informasi kepegawaian	Website	-	1	-	1	-	BKPSDM
Tersedianya informasi kepegawaian yang ter-update	Persentase informasi kepegawaian yang dimutakhirkan		Pemutakhiran sistem informasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100	BKPSDM

## 2) Organisasi

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2030	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya hasil evaluasi kelembagaan Perangkat	Jumlah laporan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.	Evaluasi	Pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	1	1	1	1	Bagian Organisasi
Tersedianya tindak lanjut hasil evaluasi Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Penataan	Tindaklanjut hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi

### 3) Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.	Tim Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Surat Keputusan Bupati	1	-	-	-	-	Bagian Organisasi
Terlaksananya rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	Persentase pelaksanaan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi		Pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi	%	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi
Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi	Dokumen	2	2	2	2	2	Bagian Organisasi
Tersedianya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	Road Map Reformasi Birokrasi	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	-	-	-	-	Bagian Organisasi
Tersedianya area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	Jumlah area perubahan		Penetapan fokus area perubahan Reformasi Birokrasi	Area	4	-	-	-	-	Bagian Organisasi
Tersedianya quick win reformasi birokrasi	Jumlah quick win reformasi birokrasi yang ditetapkan		Penetapan quick win dalam Road Map	Quick win	-	1	-	-	-	Bagian Organisasi
Terakomodirnya Perangkat Daerah dalam penyusunan Road Map	Persentase keterlibatan Perangkat Daerah dalam penyusunan Road Map		Cakupan penyusunan Road Map	%	100	-	-	-	-	Bagian Organisasi
Terlaksananya sosialisasi/internalisasi Road Map	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi/internalisasi Road Map		Sosialisasi/Internalisasi Road Map	Perangkat Daerah	-	1	-	-	-	Bagian Organisasi
Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Tim PMPRB	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Tim PMPRB	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim PMPRB	Surat Keputusan Bupati	1	1	1	1	1	Inspektorat
Terlaksananya rapat koordinasi PMPRB	Jumlah rapat koordinasi PMPRB		Koordinasi PMPRB dengan unit kerja terkait	Kali	2	2	2	2	2	Inspektorat

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terlaksananya pelatihan bagi Tim Asesor PMPRB	Jumlah pelatihan bagi Tim Asesor PMPRB		Pelatihan Tim Asesor PMPRB	Kali	-	1	1	1	1	Inspektorat
Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Struktural Sebagai Asesor PMPRB	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Struktural Sebagai Asesor PMPRB		Penetapan asesor pelaksana PMPRB	Surat Keputusan Bupati	-	1	1	1	1	Inspektorat
Tersediaanya hasil revidi kertas kerja oleh koordinator asesor	Persentase kertas kerja yang telah direvidi		Pelaksanaan revidi terhadap kertas kerja asesor	%	-	100	100	100	100	Inspektorat
Tercapainya konsensus atas pengisian kertas kerja PMPRB	Persentase pencapaian konsensus atas pengisian kertas kerja PMPRB		Pencapaian konsensus atas pengisian kertas kerja PMPRB	%	-	100	100	100	100	Inspektorat
Tersedianya RATL reformasi birokrasi	Persentase pelaksanaan RATL reformasi birokrasi		Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) reformasi birokrasi	%	-	100	100	100	100	Inspektorat
Terlibatnya pimpinan Perangkat Daerah secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Persentase pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja	Pelibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	%	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi
Tersedianya media komunikasi secara regular	Jumlah media komunikasi secara regular		Penyediaan media komunikasi secara regular untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang atau akan dilakukan	Media komunikasi	-	1	-	-	-	Bagian Organisasi

#### 4) Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan	Jumlah Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan	Standar Pelayanan	Penetapan kebijakan standar pelayanan	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	Bagian Organisasi
Tersedianya maklumat standar pelayanan	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki maklumat pelayanan		Pemakluman standar pelayanan	%	70	80	90	100	100	Perangkat Daerah
Tersedianya SOP pelayanan	Persentase standar pelayanan yang memiliki SOP		Penyusunan SOP pelayanan	%	-	50	-	100	-	Perangkat Daerah
Tersedianya hasil reviu standar pelayanan	Jumlah laporan hasil reviu standar pelayanan		Pelaksanaan reviu standar pelayanan	Dokumen	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
Tersedianya hasil reviu SOP	Jumlah laporan hasil reviu SOP		Pelaksanaan reviu SOP	Dokumen	-	-	1	-	1	Bagian Organisasi
Tersedianya media pengaduan pelayanan	Jumlah media pengaduan	Pengelolaan Pengaduan	Penyediaan media pengaduan pelayanan	Media pengaduan	2	2	2	2	2	Perangkat Daerah
Tersedianya SOP pengaduan pelayanan	Jumlah SOP pengaduan pelayanan		Penyusunan SOP pengaduan pelayanan	Dokumen	-	2	2	2	2	Perangkat Daerah
Tersedianya unit pengelola pengaduan pelayanan	Persentase Perangkat Daerah pemberi layanan yang sudah membentuk unit pengelola pengaduan		Pembentukan unit pengelola pengaduan pelayanan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi
Terlaksananya tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan	Persentase pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti		Tindaklanjut pengaduan pelayanan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi
Tersedianya hasil evaluasi atas penanganan pengaduan	Jumlah laporan hasil evaluasi atas penanganan pengaduan		Pelaksanaan evaluasi atas penanganan pengaduan	Dokumen	-	-	1	1	1	Dinas Kominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi
Tersedianya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
Tersedianya data/informasi hasil survei	Jumlah media publikasi		Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Media publikasi	1	1	1	1	1	Dinas Kominfo
Tersedianya rekomendasi hasil survey	Persentase hasil survei yang ditindaklanjuti		Tindaklanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi
Tersedianya rencana penerapan teknologi informasi	Jumlah rencana penerapan teknologi informasi	Pemanfaatan teknologi Informasi	Perencanaan penerapan teknologi informasi	Dokumen	-	1	1	1	1	Dinas Kominfo

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya teknologi informasi	Persentase jenis layanan yang sudah menerapkan teknologi informasi		Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	%	20	40	60	80	100	Perangkat Daerah
Terlaksananya perbaikan pelayanan berbasis teknologi informasi	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi yang diperbaiki		Pelaksanaan perbaikan pelayanan berbasis teknologi informasi	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

## b. Prioritas yang harus terus dipelihara

### 1) Opini BPK atas laporan keuangan

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terceptanya penyelenggaraan daerah yang berkualitas	Opini BPK	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WYP	Badan Keuangan dan Inspektorat

### 2) Persentase pengadaan barang dan jasa melalui system *e-procurement*

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang ULPBJ	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang ULPBJ.	Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ)	Surat Keputusan Bupati	5	-	-	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) PBJ	Jumlah SOP PBJ		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang dan jasa	Dokumen	2	2	2	2	2	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa		Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa	Paket	2273	2233	2338	2343	2253	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	1	1	1	1	1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

### 3) Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya hasil evaluasi kelembagaan Perangkat	Jumlah laporan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.	Penataan dan penguatan organisasi	Pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
Tersedianya tindak lanjut hasil evaluasi Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti		Tindaklanjut hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi

### 4) Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
Tersedianya data/informasi hasil survei	Jumlah media publikasi		Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Media publikasi	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
Tersedianya rekomendasi hasil survey	Persentase hasil survei yang ditindaklanjuti		Tindaklanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi

**c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan**

**1) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur**

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	20	20	20	20	20	BKPSDM

**2) Penyediaan tenaga kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas**

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Perhitungan Rencana Kebutuhan Tenaga (Puskesmas, RSUD, UPT IFK)	%	0,017	0,018	0,019	0,020	0,021	Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan Biaya RPL Uji Kompetensi (UKOM) Tenaga Kesehatan Maluku Tenggara Sehat Pemenuhan Tenaga Kesehatan di FKPT Magang	%	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	Dinas Kesehatan

**3) Quick Wins**

**1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan kesehatan**

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Standarisasi pelayanan kesehatan	Penguatan Akreditasi FKTP Puskesmas	Puskesmas	6	7	8	9	10	Dinas Kesehatan

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Akreditasi RSUD Tipe C	Standarisasi pelayanan kesehatan	Penguatan Akreditasi RSUD	Tipe	C	C	C	C	C	Dinas Kesehatan
	Persentase gedung Puskesmas dan Pustu dalam kondisi Baik	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskemas	%	47	50	54	58	62	Dinas Kesehatan
	Persentase pemenuhan peralatan medis Puskesmas dan Pustu sesuai kebutuhan	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan Alat Kesehatan	%	42	46	50	54	58	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan ruangan pelayanan pasien dan peralatan medis sesuai kebutuhan	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Pengadaan sarana dan prasarana RSUD	%	62	64	66	68	70	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana dan prasarana RSUD dalam kondisi baik	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD	%	75	80	85	90	100	Dinas Kesehatan
	Persentase pemenuhan obat sesuai kebutuhan	Obat dan perbekalan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Penyediaan obat dan perbekalan RSUD	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

## 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	80,00	82,55	85,00	87,55	90,00	DPMPTSP
			Pemantauan Usaha/Bangunan Baru oleh Tim Teknis	Usaha/ Bangunan	50	50	50	50	50	DPMPTSP
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	DPMPTSP

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	%	100	100	100	100	100	DPMPTSP
			Koordinasi Teknis Unit Pengelolah Perizinan	Kali	4	4	4	4	4	DPMPTSP
			Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan	Dokumen	2	2	2	2	2	DPMPTSP
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Kecamatan	11	11	11	11	11	DPMPTSP
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	%	100	100	100	100	100	DPMPTSP

#### d. Prioritas Perangkat Daerah

##### 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	80,00	82,55	85,00	87,55	90,00	DPMPTSP
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	DPMPTSP
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Kecamatan	11	11	11	11	11	DPMPTSP
Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui KKBPK	Persentase Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)		Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	%	3.2	3	2.9	2.7	2.6	DPKKB
			Pelayanan KIE	%	68	70.85	72.65	73.9	75	DPKKB
			Pelayanan KB Melalui Kesatuan Gerak PKK	PUS	224	279	287	293	295	DPKKB

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Persentase pelayanan Dafduk dan capil	Program pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan Dafduk dan capil	%	80	85	90	95	100	DISDUKCAPIL
Meningkatnya pelayanan Informasi kebencanaan dan pencegahan dini	Persentase Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	Program Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	-	%	100	100	100	100	100	BPBD
Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni				71,08	75,9	80,72	85,54	90,36	DPKPP
Tersedianya tanah bagi pelaksanaan pembangunan	Cakupan Penyediaan tanah untuk kepentingan umum				100	100	100	100	100	DPKPP
Tersedianya tanah bagi pelaksanaan pembangunan	Cakupan Penyediaan tanah untuk kepentingan umum				100	100	100	100	100	DPKPP
Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah luasan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program Peningkatan Produksi Pertanian		Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	814.7	819.5	824.2	829.0	833.9	Dinas Pertanian
Meningkatnya produksi perkebunan tanaman kelapa dan pala	Jumlah peremajaan kelapa dan perluasan areal pala	Pengembangan Komiditi Perkebunan		Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	349	361,5	362,5	363,5	364,5	Dinas Pertanian
Meningkatnya produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing	Pertumbuhan Produksi Rumput laut	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana budidaya Rumput Laut	Unit	25	26	60	60	60	Dinas Perikanan
			Pembentukan Kelompok Pembudidaya-Ikan (POKDAKAN)	Pokdakan	-	8	20	20	20	Dinas Perikanan
	Pertumbuhan Produksi Ikan Hasil Budidaya	Program Pengembangan Klaster Perikanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana budidaya Rumput Laut (Klaster Budidaya)	(Unit)	-	-	70	70	60	Dinas Perikanan
Meningkatnya perlindungan kesejahteraan Sosial	Persentase anak/perempuan yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban	Jumlah Perempuan dan Anak yang bermasalah dan berhadapan	40	40	40	40	40	Dinas Sosial Daerah

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dengan hukum						
	Persentase penyandang cacat mental yang mendapat bantuan		Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat fisik dan metal	Orang	40	40	40	40	40	Dinas Sosial Daerah
	Persentase kesejahteraan anak dalam panti yang terlayani		Pelayanan rehabilitasi sosial anak dalam panti	Panti	4	4	4	4	4	Dinas Sosial Daerah
	Jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapat bantuan		Pelayanan bantuan kedaruratan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Orang	20	20	20	20	20	Dinas Sosial Daerah
	Kesejahteraan lanjut usia yang terkayani		Pelayanan dan perlindungan kesejahteraan lanjut usia	Orang	50	50	50	50	50	Dinas Sosial Daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pemutahiran Data dan ZNT Pajak Bumi dan Bangunan	WP/OP	3000	3000	3000	3000	3000	Badan Pendapatan Asli Daerah
			Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	WP	19,523	19,523	19,523	19,523	19,523	Badan Pendapatan Asli Daerah
			Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	OP	-	60	70	80	90	Badan Pendapatan Asli Daerah
Meningkatkan akses layanan informasi dan komunikasi	Jumlah Ohoi Akses Internet dan Selular	Program Pengelolaan Informasi dan Informasi Publik								Dinas Komunikasi dan Informatika
	Terpublikasinya konten – konten Pemerintah di website Pemda		Produksi Konten Informasi Publik	Konten	2	2	3	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Informasi berita yang diumumkan		Penyebarluasan Informasi Melalui Media	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase dokumen & data di website Pemda Malra		Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya peningkatan ketentraman masyarakat	Persentase penanganan pelanggaran K3	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penaganan Dini Konflik dalam masyarakat	%	100	100	100	100	100	Satuan Pol PP

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyuluhan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	100	100	Satuan Pol PP
			Patroli wilayah trantibum	%	100	100	100	100	100	Satuan Pol PP

## 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	3	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai/Predikat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara	Dokumen	1	-	-	-	-	BAPPEDA
			Penyusunan IKU Kabupaten Maluku Tenggara	Dokumen	1	-	-	-	-	BAPPEDA
			Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	BAPPEDA
			Penyusunan RKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	BAPPEDA
			Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
			Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Dokumen	41	41	41	41	41	Perangkat Daerah
			Penyusunan IKU Perangkat Daerah	Dokumen	41	41	41	41	41	Perangkat Daerah
			Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	41	41	41	41	41	Perangkat Daerah
			Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	41	41	41	41	41	Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	3	6	7	8	9	10	11
			Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	41	41	41	41	41	Perangkat Daerah
			Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	41	41	41	41	41	Perangkat Daerah
			Penyusunan LHE AKIP	Dokumen	1	1	1	1	1	Inspektorat

### **C. Kegiatan-kegiatan.**

Kegiatan – kegiatan berdasarkan Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah antara lain :

a) Sumber Daya Manusia, kegiatannya antara lain :

1. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. Pelaksanaan penghitungan kebutuhan pegawai;
3. Penyusunan rencana redistribusi pegawai;
4. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun;
5. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama;
6. Publikasi penerimaan pegawai secara terbuka;
7. Pelaksanaan pendaftaran pegawai secara online;
8. Pelaksanaan seleksi pegawai secara transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN;
9. Publikasi hasil seleksi pegawai secara terbuka;
10. Penyusunan standar kompetensi jabatan;
11. Pelaksanaan assessment pegawai;
12. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi;
13. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai;
14. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai rencana dan kebutuhan;
15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
16. Penyusunan kebijakan promosi jabatan secara terbuka;
17. Pelaksanaan promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi

18. Pembentukan panitia seleksi pelaksanaan promosi terbuka;
19. Publikasi hasil tahapan seleksi secara terbuka;
20. Penerapan penetapan Indikator Kinerja Individu;
21. Pelaksanaan pengukuran, penilaian kinerja individu secara tahunan;
22. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu;
23. Pelaksanaan pengembangan karir sesuai hasil penilaian kinerja individu;
24. Pemberian tunjangan kinerja sesuai capaian kinerja individu;
25. Penyusunan kebijakan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai;
26. Implementasi aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai;
27. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai;
28. Pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai;
29. Penyusunan informasi faktor jabatan;
30. Penetapan peta jabatan;
31. Penetapan kelas jabatan;
32. Pembangunan sistem informasi kepegawaian;
33. Pemutakhiran sistem informasi kepegawaian;

b) Organisasi, kegiatannya antara lain :

1. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;

c) Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur, kegiatannya antara lain :

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
2. Pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi;
4. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;
5. Penetapan fokus area perubahan Reformasi Birokrasi;
6. Penetapan quick win dalam Road Map;
7. Cakupan penyusunan Road Map;
8. Sosialisasi/Internalisasi Road Map;

9. Pembentukan Tim PMPRB;
10. Koordinasi PMPRB dengan unit terkait Pelatihan Tim Asesor PMPRB;
11. Penetapan asesor pelaksana PMPRB;
12. Pelaksanaan reviu terhadap kertas kerja asesor;
13. Pencapaian konsensus atas pengisian kertas kerja PMPRB;
14. Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) reformasi birokrasi;
15. Pelibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
16. Penyediaan media komunikasi secara regular untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang atau akan dilakukan.

d) Pelayanan Publik, kegiatannya antara lain :

1. Penetapan kebijakan standar pelayanan;
2. Pemakluman standar pelayanan;
3. Penyusunan SOP pelayanan;
4. Pelaksanaan reviu standar pelayanan;
5. Pelaksanaan reviu SOP;
6. Penyediaan media pengaduan pelayanan;
7. Penyusunan SOP pengaduan pelayanan;
8. Pembentukan unit pengelola pengaduan pelayanan;
9. Tindaklanjut pengaduan pelayanan;
10. Pelaksanaan evaluasi atas penanganan pengaduan;
11. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
13. Tindaklanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
14. Perencanaan penerapan teknologi informasi;
15. Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan;
16. Pelaksanaan perbaikan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Kegiatan – kegiatan berdasarkan prioritas yang harus terus terpelihara antara lain :

- a) Opini BPK atas Laporan Keuangan kegiatannya adalah Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- b) Presentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui *system e-procurement*, kegiatannya antara lain :
  1. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ);
  2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang dan jasa;
  3. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa;
  4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- c) Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, kegiatannya antara lain :
  1. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;
  2. Tindaklanjut hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.
- d) Indeks Kepuasan Masyarakat, kegiatannya antara lain :
  1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
  2. Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
  3. Tindaklanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Kegiatan – kegiatan berdasarkan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan antara lain :

- a) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, kegiatannya antara lain :
  1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- b) Penyediaan tenaga kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas, kegiatannya antara lain :
  1. Perhitungan Rencana Kebutuhan Tenaga (Puskesmas, RSUD, UPT IFK);
  2. Penyediaan Biaya RPL Uji Kompetensi (UKOM) Tenaga Kesehatan Maluku Tenggara Sehat Pemenuhan Tenaga Kesehatan di FKPT Magang.

Kegiatan – kegiatan berdasarkan Quick Wins antara lain :

- a) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan kesehatan, kegiatannya antara lain :
  1. Penguatan Akreditasi FKTP Puskesmas;
  2. Penguatan Akreditasi RSUD;
  3. Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas;
  4. Penyediaan Alat Kesehatan;
  5. Pengadaan sarana dan prasarana RSUD;
  6. Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD;
  7. Penyediaan obat dan perbekalan RSUD.
- b) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, kegiatannya antara lain :
  1. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan;
  2. Pemantauan Usaha/Bangunan Baru oleh Tim Teknis;
  3. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
  4. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;
  5. Koordinasi Teknis Unit Pengelolah Perizinan;
  6. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan;
  7. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling;
  8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kegiatan – kegiatan berdasarkan Prioritas Perangkat Daerah antara lain :

- a) Peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatannya antara lain :
  1. Penyusunan Standar Pelayanan;
  2. Pemakluman Standar Pelayanan;
  3. Penyusunan SOP Pelayanan;
  4. Pelaksanaan reviuw standar pelayanan;
  5. Pelaksanaan reviuw SOP;
  6. Pembentukan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan;
  7. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
- b) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, kegiatannya antara lain :
  1. Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Penyusunan IKU Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah;
  4. Penyusunan RKPD;
  5. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
  6. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
  7. Penyusunan IKU Perangkat Daerah;
  8. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
  9. Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
  10. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah;
  11. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
  12. Penyusunan LHE AKIP.
  - 13.

#### **D. Rencana Aksi**

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

## **BAB. IV. MONITORING DAN EVALUASI**

### **A. Monitoring**

Monitoring dilakukan setiap tahun sekali, Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi.

### **B. Evaluasi**

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab.

## **BAB. V. PENUTUP**

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke-2 setelah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2014-2018 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten 5 (lima) tahun mendatang tahun 2019-2023.

Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD/Unit Kerja khusus SKPD/Unit Kerja yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2018–2022 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap SKPD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah

Kabupaten harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 93 TAHUN 2019  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019**

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
TAHUN 2019 – 2023**

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Mental aparatur/ pola pikir ( <i>mind set</i> ) dan budaya kerja ( <i>culture set</i> )	Meningkatnya integritas aparatur	Manajemen Perubahan										
			1	Tim Reformasi Birokrasi									
			a	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.	Surat Keputusan Bupati	1	-	-	-	-	Bagian Organisasi
			b	Pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi	Terlaksananya rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	Persentase pelaksanaan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	%	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi
			c	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi	Dokumen	2	2	2	2	2	Bagian Organisasi
			2	Road Map Reformasi Birokrasi									
a	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Tersedianya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Dokumen	1	-	-	-	-	Bagian Organisasi			

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
				Maluku Tenggara	Maluku Tenggara								
			b	Penetapan fokus area perubahan Reformasi Birokrasi	Tersedianya area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	Jumlah area perubahan	Area	4	-	-	-	-	Bagian Organisasi
			c	Penetapan <i>quick win</i> dalam Road Map	Tersedianya <i>quick win</i> reformasi birokrasi	Jumlah <i>quick win</i> reformasi birokrasi yang ditetapkan	<i>Quick win</i>	-	1	-	-	-	Bagian Organisasi
			d	Cakupan penyusunan Road Map	Terakomodirnya Perangkat Daerah dalam penyusunan Road Map	Persentase keterlibatan Perangkat Daerah dalam penyusunan Road Map	%	100	-	-	-	-	Bagian Organisasi
			e	Sosialisasi/Internalisasi Road Map	Terlaksananya sosialisasi/internalisasi Road Map	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi/internalisasi Road Map	Perangkat Daerah	-	1	-	-	-	Bagian Organisasi
		Meningkatnya efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi	3	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi									
			a	Pembentukan Tim PMPRB	Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Tim PMPRB	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Tim PMPRB	Surat Keputusan Bupati	1	1	1	1	1	Inspektorat
			b	Koordinasi PMPRB dengan unit kerja terkait	Terlaksananya rapat koordinasi PMPRB	Jumlah rapat koordinasi PMPRB.	Kali	2	2	2	2	2	Inspektorat
			c	Pelatihan Tim Assesor PMPRB	Terlaksananya pelatihan bagi Tim Assesor PMPRB	Jumlah pelatihan bagi Tim Assesor PMPRB	Kali	-	1	1	1	1	Inspektorat

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
			d	Penetapan asesor pelaksana PMPRB	Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Struktural Sebagai Asesor PMPRB	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Struktural Sebagai Asesor PMPRB	Surat Keputusan Bupati	-	1	1	1	1	Inspektorat
			e	Pelaksanaan reuiu terhadap kertas kerja asesor	Tersediaanya hasil reuiu kertas kerja oleh koordinator asesor	Persentase kertas kerja yang telah direuiu	%	-	100	100	100	100	Inspektorat
			f	Pencapaian konsensus atas pengisian kertas kerja PMPRB	Tercapainya konsensus atas pengisian kertas kerja PMPRB	Persentase pencapaian konsensus atas pengisian kertas kerja PMPRB	%	-	100	100	100	100	Inspektorat
			g	Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) reformasi birokrasi	Tersedianya RATL reformasi birokrasi	Persentase pelaksanaan RATL reformasi birokrasi	%	-	100	100	100	100	Inspektorat
			4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja									
			a	Pelibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Terlibatnya pimpinan Perangkat Daerah secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Persentase pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi	%	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi
			b	Penyediaan media komunikasi secara regular untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang	Tersedianya media komunikasi secara regular	Jumlah media komunikasi secara regular	Media komunikasi	-	1	-	-	-	Bagian Organisasi

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
				atau akan dilakukan									
2	Peraturan perundang - undangan	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Penataan Peraturan Perundang-Undangan										
			1	Harmonisasi									
			a	Pelaksanaan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Tersedianya hasil identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/sinkron	Jumlah dokumen hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/sinkron	Dokumen	1	1	1	1	1	Bagian Hukum
			b	Pelaksanaan revisi produk hukum daerah yang tidak harmonis/sinkron	Tersedianya produk hukum daerah yang harmonis/sinkron	Persentase produk hukum daerah yang harmonis/sinkron	%	100	100	100	100	100	Bagian Hukum
			2	Sistem Pengendalian Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan									
a	Penyusunan sistem pengendalian/ Standar Operasional Prosedur	Tersedianya sistem pengendalian/ Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP penyusunan produk hukum daerah.	Dokumen	-	1	-	-	-	Bagian Hukum			

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN		KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	
				(SOP) penyusunan produk hukum daerah	(SOP) penyusunan produk hukum daerah								
			b	Pelaksanaan evaluasi atas sistem pengendalian/ Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala	Tersedianya hasil evaluasi atas sistem pengendalian/ Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala	Jumlah laporan evaluasi sistem pengendalian/ Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan produk hukum daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Bagian Hukum
3	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Penguatan dan Penguatan Organisasi										
			1	Evaluasi									
			a	Pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	Tersedianya hasil evaluasi kelembagaan Perangkat	Jumlah laporan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.	Dokumen	-	1	1	1	1	Bagian Organisasi
			2	Penataan									
			a	Tindaklanjut hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	Tersedianya tindak lanjut hasil evaluasi Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi
4	Ketatalaksanaan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Penataan Tatalaksana										
			1	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap/ Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama									
			a	Penyusunan peta proses bisnis	Tersedianya peta proses bisnis	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki peta proses	%	-	-	-	100	100	Perangkat Daerah pemberi layanan

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
					bisnis								
			b	Penjabaran peta proses bisnis ke dalam SOP	Tersedianya peta proses bisnis ke dalam SOP	Persentase SOP yang telah menjabarkan peta proses bisnis	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah pemberi layanan
			c	Penerapan SOP	Terlaksananya SOP pada seluruh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SOP	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah pemberi layanan
			d	Pelaksanaan evaluasi peta proses bisnis dan SOP	Tersedianya hasil evaluasi peta proses bisnis dan SOP	Jumlah laporan hasil evaluasi peta proses bisnis dan SOP	Dokumen	-	-	-	1	1	Perangkat Daerah pemberi layanan
			2	<i>E- Government</i>									
			a	Perencanaan pengembangan e-government	Tersedianya rencana pengembangan e-government	Jumlah rencana pengembangan e-government	Dokumen	-	1	-	-	-	Perangkat Daerah
			b	Implementasi pengembangan e-government	Terlaksananya pengembangan e-government	Persentase perangkat daerah yang sudah mengembangkan e-government	%	-	100	-	-	-	Perangkat Daerah
			c	Pengembangan sistem pelayanan transaksi berbasis online	Terlaksananya pelayanan berbasis online	Persentase transaksi berbasis online	%	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			3	Keterbukaan Informasi Publik									
			a	Penyusunan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	Dinas Kominfo

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
			b	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	Teraksesnya seluruh informasi publik	Persentase informasi publik yang dapat diakses masyarakat	%	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo
			c	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas Kominfo
			4	Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa									
			a	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ)	Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang ULPBJ	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang ULPBJ	Surat Keputusan Bupati	1	1	1	1	1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			b	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang dan jasa	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) PBJ	Jumlah SOP PBJ	Dokumen	-	1	-	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			c	Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa	Paket	?	?	?	?	?	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			d	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	1	1	1	1	1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia										
			1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi									

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
		Manusia Aparatur	a	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Tersediannya Informasi jabatan dan beban kerja	Jumlah informasi jabatan dan beban kerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Perangkat Daerah
			b	Pelaksanaan penghitungan kebutuhan pegawai	Tersedianya informasi kebutuhan pegawai Pemerintah Daerah	Jumlah informasi kebutuhan pegawai masing-masing Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
			c	Penyusunan rencana redistribusi pegawai	Tersedianya rencana pendistribusian pegawai	Jumlah rencana pendistribusian pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
			d	Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	Tersedianya proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	Jumlah proyeksi kebutuhan pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
			e	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama	Tersedianya formasi jabatan yang menunjang kinerja utama	Jumlah formasi jabatan yang menunjang kinerja utama	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
			2	Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Obyektif, Akuntabel dan Bebas KKN									
			a	Publikasi penerimaan pegawai secara terbuka	Tersampainya informasi penerimaan pegawai kepada masyarakat	Jumlah media publikasi	Media publikasi	1	1	1	1	1	BKPSDM
				Pelaksanaan pendaftaran pegawai secara online	Tersedianya informasi status pendaftar	Jumlah website pendaftaran pegawai	Website	1	1	1	1	1	BKPSDM
			b	Pelaksanaan seleksi pegawai secara transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Terlaksananya seleksi pegawai berbasis <i>Computer Assisted Tes</i> (CAT)	Jumlah pelaksanaan seleksi pegawai menggunakan <i>Computer Assisted Tes/ CAT</i> .	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
			c	Publikasi hasil seleksi pegawai secara terbuka	Tersampainya informasi hasil seleksi penerimaan pegawai	Jumlah media publikasi hasil seleksi penerimaan pegawai	Media publikasi	1	1	1	1	1	BKPSDM
			3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi									BKPSDM
			a	Penyusunan standar kompetensi jabatan	Tersedianya standar kompetensi jabatan	Jumlah standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah	Dokumen	1	-	1	-	1	Bagian Organisasi
			b	Pelaksanaan assessment pegawai	Terlaksananya assessment pegawai	Jumlah pelaksanaan assessment pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
			c	Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Tersedianya informasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Jumlah informasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Dokumen	-	1	-	1	1	BKPSDM
			d	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai	Tersedianya rencana pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah rencana pengembangan kompetensi pegawai.	Dokumen	-	1	-	1	-	BKPSDM
			e	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai rencana dan kebutuhan	Terlaksananya pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Persentase pengembangan pegawai sesuai rencana dan kebutuhan	%	100	100	100	100	100	BKPSDM
			f	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen	1	1	1	1	1	BKPSDM
			4	Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka									
			a	Penyusunan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Promosi Jabatan Secara Terbuka	Jumlah Peraturan Bupati tentang Promosi Jabatan Secara	Peraturan Bupati	1	1	1	1	1	BKPSDM

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
					Terbuka								
			b	Pelaksanaan promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	Terlaksananya promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	Persentase jabatan pimpinan tinggi yang terisi sesuai promosi terbuka	%	100	100	100	100	100	BKPSDM
			c	Pembentukan panitia seleksi pelaksanaan promosi terbuka	Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Pelaksanaan Promosi Terbuka	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Pelaksanaan Promosi Terbuka	Surat Keputusan Bupati	1	1	1	1	1	BKPSDM
				Publikasi hasil tahapan seleksi secara terbuka	Tersampaiannya hasil tahapan seleksi	Jumlah media publikasi	Media publikasi	1	1	1	1	1	BKPSDM
			5	Penetapan Kinerja Individu									
			a	Penerapan penetapan Indikator Kinerja Individu	Tersedianya penetapan Indikator Kinerja Individu pada setiap Perangkat Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang telah menetapkan Indikator Kinerja Individu	%	-	100	100	100	100	Perangkat Daerah
			b	Pelaksanaan pengukuran, penilaian kinerja individu secara tahunan	Tersedianya ukuran/ nilai kinerja individu secara tahunan	Presentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu secara tahunan	%	-	100	100	100	100	Perangkat Daerah
			c	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu	Dokumen	-	-	1	1	1	Perangkat Daerah

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
			d	Pelaksanaan pengembangan karir sesuai hasil penilaian kinerja individu	Terlaksananya pengembangan karir sesuai hasil penilaian kinerja individu	Persentase pelaksanaan pengembangan karir sesuai hasil penilaian kinerja individu	%	-	100	100	100	100	BKPSDM
			e	Pemberian tunjangan kinerja sesuai capaian kinerja individu	Tersedianya tunjangan kinerja sesuai capaian kinerja individu	Persentase penerapan tunjangan kinerja sesuai capaian kinerja individu pada seluruh Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	100	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			6	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai									
			a	Penyusunan kebijakan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Disiplin/ Kode Etik/ Kode Prilaku Pegawai	Jumlah Peraturan Bupati tentang Disiplin/ Kode Etik/ Kode Prilaku Pegawai	Peraturan Bupati	-	-	1	-	-	Bagian Organisasi
			b	Implementasi aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	Terlaksananya penerapan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah
			c	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode prilaku pegawai.	Dokumen	-	1	1	1	1	BKPSDM

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
			d	Pemberian penghargaan ( <i>reward</i> ) dan sanksi ( <i>punishment</i> ) atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai	Tersedianya penghargaan ( <i>reward</i> ) dan sanksi ( <i>punishment</i> ) pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai	Persentase pemberian penghargaan ( <i>reward</i> ) dan sanksi ( <i>punishment</i> ) atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai	%	-	100	100	100	100	BKPSDM
			7	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan									
			a	Penyusunan informasi faktor jabatan	Tersedianya informasi faktor jabatan	Jumlah informasi faktor jabatan	Dokumen	-	5	-	-	5	Bagian Organisasi
			b	Penetapan peta jabatan	Tersedianya peta jabatan	Jumlah peta jabatan	Dokumen	-	5	-	-	5	Bagian Organisasi
			c	Penetapan kelas jabatan	Tersedianya kelas jabatan	Jumlah kelas jabatan	Dokumen	-	5	-	-	5	Bagian Organisasi
			8	Sistem Informasi Kepegawaian									
			a	Pembangunan sistem informasi kepegawaian	Tersedianya sistem informasi kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang dibangun	Website	-	1	-	1	-	BKPSDM
			b	Pemutakhiran sistem informasi kepegawaian	Tersedianya informasi kepegawaian yang ter- <i>update</i>	Persentase informasi kepegawaian yang dimutakhirkan	%	100	100	100	100	100	BKPSDM
6	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari	Penguatan Pengawasan										
			1	Gratifikasi									
			a	Penyusunan kebijakan gratifikasi	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Gratifikasi	Jumlah Peraturan Bupati tentang	Peraturan Bupati	1	-	-	-	-	Inspektorat

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
		korupsi, kolusi dan nepotisme (Wajar Tanpa Pengecualian)			Gratifikasi								
			b	Pelaksanaan <i>public campaign</i>	Terlaksananya <i>public campaign</i>	Frekuensi <i>public campaign</i> per tahun	Kali	3	3	3	3	3	Inspektorat
			c	Implementasi kebijakan gratifikasi	Meningkatnya kesadaran pelaporan gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi	Dokumen	10	10	10	10	10	Inspektorat
			d	pelaksanaan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Tersedianya hasil evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Jumlah laporan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Dokumen	2	2	2	2	2	Inspektorat
			e	Tindaklanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi	Terlaksananya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi	Persentase hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi yang di tindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	Inspektorat
			2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)									
			a	Penetapan kebijakan penerapan SPIP	Tersedianya Peraturan Bupati tentang SPIP	Jumlah Peraturan Bupati tentang SPIP	Peraturan Bupati	1	-	-	-	-	Inspektorat
			b	Pembangunan lingkungan pengendalian	Terbangunnya sistem pengendalian dilingkungan pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP dengan baik	%	90	90	90	90	90	Inspektorat
			c	Pelaksanaan penilaian resiko atas organisasi	Tersedianya risk registrasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Risk Registrasi	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah
			d	Pelaksanaan pengendalian atas resiko yang teridentifikasi	Tersedianya Rencana Tindak Lanjut Pengendalian dan hasil evaluasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun RTP dan laporan evaluasi	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
							2019	2020	2021	2022	2023	
			masyarakat	masyarakat								
			e Pelaksanaan sosialisasi SPIP	Tersosialisasikannya informasi SPIP	Jumlah sosialisasi SPIP	Kali	1	1	-	-	-	Inspektorat
			f Pemantauan SPIP	Tersedianya hasil self Assesment Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	Inspektorat
			3 Pengaduan Masyarakat									
			a Penyusunan kebijakan pengaduan masyarakat	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Pengaduan Masyarakat	Jumlah Peraturan Bupati tentang Pengaduan Masyarakat	Peraturan Bupati	1	-	-	-	-	Inspektorat

b	Implementasi penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat oleh seluruh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah
c	Penanganan pengaduan masyarakat	Tertanganiya pengaduan masyarakat	Persentase laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Bagian Organisasi
d	Pelaksanaan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tersedianya hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen	2	2	2	2	2	Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Bagian Organisasi
e	Tindaklanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan	Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Inspektorat

4 Whistle Blowing System

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
			a	Penetapan kebijakan tentang <i>Whistle Blowing System</i>	Tersedianya Peraturan Bupati tentang <i>Whistle Blowing System</i>	Jumlah Peraturan Bupati tentang <i>Whistle Blowing System</i>	Peraturan Bupati	1	-	-	-	-	Inspektorat
			b	Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i>	Terlaksananya sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i>	Jumlah sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i>	Kali	3	3	3	3	3	Inspektorat
			c	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>	Terimplementasinya <i>Whistle Blowing System</i>	Persentase laporan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Inspektorat
			d	Pelaksanaan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>	Tersedianya hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>	Jumlah laporan hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	Inspektorat
			e	Tindaklanjut hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>	Terlaksananya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Inspektorat
			5	Penanganan Benturan Kepentingan									
			a	Penetapan kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan	Peraturan Bupati	1	-	-	-	-	Inspektorat
			b	Sosialisasi kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan	Kali	2	2	2	2	2	Inspektorat
			c	Implementasi kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya penanganan benturan kepentingan	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan penanganan benturan	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
					kepentingan								
			d	Pelaksanaan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Tersedianya hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Jumlah laporan hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Dokumen	1	1	1	1	1	Inspektorat
			e	Tindaklanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Inspektorat
			6	Pembangunan Zona Integritas									
			a	Pencanangan zona integritas	Terlaksananya pencanangan zona integritas	Pencanangan zona integritas	Kali	1	-	-	-	-	Inspektorat
			b	Penetapan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas dengan Keputusan Bupati	Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan <i>Pilot Project</i> zona integritas	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan <i>Pilot Project</i> zona integritas	Surat Keputusan Bupati	1	1	1	1	1	Inspektorat
			c	Pembangunan zona integritas	Tersedianya Perangkat Daerah sebagai zona integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai zona integritas	Perangkat Daerah	-	10	10	10	10	Inspektorat
			d	Pelaksanaan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan	Tersedianya hasil evaluasi atas zona integritas	Jumlah laporan hasil evaluasi atas zona integritas	Dokumen	1	1	1	1	1	Inspektorat

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
			e	Penetapan Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Tersedianya Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM	Perangkat Daerah	-	1	1	1	1	Inspektorat
			7	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)									
			a	Tindakan lanjut rekomendasi APIP	Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi APIP	Persentase penyelesaian rekomendasi APIP	%	90	90	90	90	90	Inspektorat
			b	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM APIP	Tersedianya APIP yang profesional	Level kapasitas APIP	Level	3	3	3	3	3	Inspektorat
			c	Penganggaran pelaksanaan APIP	Tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan APIP	Persentase anggaran APIP terhadap APBD	%	1	1	1	1	1	Inspektorat
			d	Pelaksanaan APIP berfokus pada client dan audit berbasis resiko	Terlaksananya pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis resiko	Persentase penyelesaian PKPT berbasis resiko	%	100	100	100	100	100	Inspektorat
7	Akuntabilitas	Meningkatnya penerapan system akuntabilitas kinerja	Penguatan Akuntabilitas										
			1	Keterlibatan Pimpinan									
			a	Pelibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra	Terlibatnya pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra	Persentase keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
			b	Pelibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Penetapan Kinerja	Terlibatnya pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Penetapan Kinerja	Presentase keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Penetapan Kinerja	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah
			c	Penilaian kinerja secara berjenjang	Tersedianya pemantauan capaian kinerja oleh atasan	Presentase atasan yang melakukan memantau capaian kinerja bawahan	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah
			2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja									
			a	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola akuntabilitas kinerja	Tersedianya Diklat/Bimtek akuntabilitas kinerja bagi SDM pengelola akuntabilitas kinerja	Persentase SDM pengelola akuntabilitas kinerja yang mengikuti Diklat/Bimtek	%	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi
			b	Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja	Tersedianya dokumen akuntabilitas kinerja	Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja yang tersusun	Dokumen	10	7	7	7	7	Perangkat Daerah
			c	Pemutakhiran data kinerja	Tersedianya data kinerja <i>ter-update</i>	Persentase data kinerja yang dimutakhirkan	%	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah
8	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										
			1	Standar Pelayanan									
			a	Penetapan kebijakan standar pelayanan	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan	Jumlah Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	Bagian Organisasi
			b	Pemakluman standar pelayanan	Tersedianya maklumat standar pelayanan	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki maklumat pelayanan	%	70	80	90	100	100	Perangkat Daerah

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
			c	Penyusunan SOP pelayanan	Tersedianya SOP pelayanan	Persentase standar pelayanan yang memiliki SOP	%	-	50	-	100	-	Perangkat Daerah
			d	Pelaksanaan reviu standar pelayanan	Tersedianya hasil reviu standar pelayanan	Jumlah laporan hasil reviu standar pelayanan	Dokumen	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
			e	Pelaksanaan reviu SOP	Tersedianya hasil reviu SOP	Jumlah laporan hasil reviu SOP	Dokumen	-	-	1	-	1	Bagian Organisasi
			2	Pengelolaan Pengaduan									
			a	Penyediaan media pengaduan pelayanan	Tersedianya media pengaduan pelayanan	Jumlah media pengaduan	Media pengaduan	2	2	2	2	2	Perangkat Daerah
			b	Penyusunan SOP pengaduan pelayanan	Tersedianya SOP pengaduan pelayanan	Jumlah SOP pengaduan pelayanan	Dokumen	-	2	2	2	2	Perangkat Daerah
			c	Pembentukan unit pengelola pengaduan pelayanan	Tersedianya unit pengelola pengaduan pelayanan	Persentase Perangkat Daerah pemberi layanan yang sudah membentuk unit pengelola pengaduan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi
			d	Tindaklanjut pengaduan pelayanan	Terlaksananya tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan	Persentase pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi
			e	Pelaksanaan evaluasi atas penanganan pengaduan	Tersedianya hasil evaluasi atas penanganan pengaduan	Jumlah laporan hasil evaluasi atas penanganan pengaduan	Dokumen	-	-	1	1	1	Dinas Kominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi
			4	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan									
			a	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Tersedianya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
			b	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tersedianya data/informasi hasil survei	Jumlah media publikasi	Media publikasi	1	1	1	1	1	Dinas Kominfo
			c	Tindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tersedianya rekomendasi hasil survey	Persentase hasil survei yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi
			5	Pemanfaatan teknologi Informasi									
			a	Perencanaan penerapan teknologi informasi	Tersedianya rencana penerapan teknologi informasi	Jumlah rencana penerapan teknologi informasi	Dokumen	-	1	1	1	1	Dinas Kominfo
			b	Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Tersedianya teknologi informasi	Jumlah pelayanan yang sudah menerapkan teknologi informasi	%	20	40	60	80	100	Perangkat Daerah
			C	Pelaksanaan perbaikan pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya perbaikan pelayanan berbasis teknologi informasi	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi yang diperbaiki	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
			6	Quick Wins Reformasi Birokrasi									
			a	Penguatan Akreditasi FKTP Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Puskesmas	6	7	8	9	10	Dinas Kesehatan
			b	Penguatan Akreditasi RSUD	Akreditasi RSUD	Akreditasi RSUD Tipe C	Tipe	C	C	C	C	C	Dinas Kesehatan
			c	Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskemas	Meningkatnya status Puskesmas Pembantu menjadi Puskemas	Persentase gedung Puskesmas dan Pustu dalam kondisi Baik	%	47	50	54	58	62	Dinas Kesehatan

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	PROGRAM & KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
							2019	2020	2021	2022	2023		
			d	Penyediaan Alat Kesehatan	Ketersediaan alat kesehatan	Persentase pemenuhan peralatan medis Puskesmas dan Pustu sesuai kebutuhan	%	42	46	50	54	58	Dinas Kesehatan
			e	Pengadaan sarana dan prasarana RSUD	Tersedianyan sarana dan prasarana pelayanan	Persentase ketersediaan ruangan pelayanan pasien dan peralatan medis sesuai kebutuhan	%	62	64	66	68	70	Dinas Kesehatan
			f	Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD	Sarana dan prasarana pelayanan yang terpelihara	Persentase sarana dan prasarana RSUD dalam kondisi baik	%	75	80	85		100	Dinas Kesehatan
			g	Penyediaan obat dan perbekalan RSUD	Ketersediaan pemenuhan obat	Persentase pemenuhan obat sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			h	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	80,00	82,55	85,00	87,55	90,00	DPMPTSP
			i	Pemantauan Usaha/Bangunan Baru oleh Tim Teknis			Usaha/Bangunan	50	50	50	50	50	DPMPTSP
			j	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat			%	100	100	100	100	100	DPMPTSP
			k	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan			%	100	100	100	100	100	DPMPTSP
			l	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling			Kecamatan	11	11	11	11	11	DPMPTSP

BUPATI MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN